

Implementasi Perencanaan Kebijakan Dana Desa Pada Desa Dataran Rendah Dengan Dataran Tinggi Di Kabupaten Gowa

Rezki Nurfadillah T¹, Mildayanti², Rahmat Hidayat³

^{1,2,3} Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Corresponding Author: Rezki Nurfadillah T, E-mail:

¹rezki.nurfadillah@unm.ac.id, ²mildayanti@unm.ac.id, ³rahmathidayat@unm.ac.id

Published: Oktober, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan perencanaan kebijakan dana desa di dua wilayah yang memiliki kondisi geografis berbeda, yaitu Desa Bontoala yang berada di dataran rendah dan Desa Parigi yang terletak di dataran tinggi dalam wilayah Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi. Hasil studi mengungkapkan bahwa kedua desa melaksanakan proses perencanaan dana desa melalui forum Musyawarah Desa, namun efektivitasnya berbeda. Desa Bontoala menunjukkan proses implementasi yang lebih disiplin dan tepat waktu karena didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang mumpuni serta aksesibilitas wilayah yang baik. Sebaliknya, Desa Parigi mengalami kendala karena kondisi geografis yang menantang dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, sehingga berpengaruh pada pelaporan dan keterlibatan masyarakat. Faktor perbedaan kondisi geografis dan kapasitas SDM merupakan elemen utama yang memengaruhi keberhasilan perencanaan dana desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Perencanaan, Wilayah pegunungan, Wilayah Dataran Rendah, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of village fund planning policies in two regions with differing geographical conditions, namely Bontoala Village, located in a lowland area, and Parigi Village, situated in a highland area within Gowa Regency. The research employs a qualitative descriptive approach, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews, direct observation, and documentation. The findings reveal that both villages conduct village fund planning through the Village Deliberation Forum, yet their levels of effectiveness vary. Bontoala Village demonstrates a more disciplined and timely implementation process, supported by well-qualified human resources and favorable accessibility. In contrast, Parigi Village faces challenges due to its difficult geographical terrain and the low educational level of its residents, which negatively impact reporting and community engagement. The differences in geographic conditions and human resource capacity emerge as the key factors influencing the success of village fund planning.

Keywords: Village Fund, Planning, Highland Area, Lowland Area, Policy Implementation

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan terkecil di Indonesia, desa memegang peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui pendelegasian wewenang serta pengucuran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut

diarahkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur fisik, pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan layanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberi kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan, dan mengelola dana desa dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel (Kapita, 2021). Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan dana desa masih menghadapi berbagai hambatan. Sejumlah riset menunjukkan bahwa meskipun tahap-tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dijalankan, masih terdapat kendala yang bersumber dari terbatasnya sumber daya manusia desa, rendahnya partisipasi masyarakat, kurang optimalnya komunikasi kebijakan, serta lemahnya sistem pengawasan

Kabupaten Gowa, yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, adalah salah satu tempat yang menerima sejumlah besar dana desa. Pada tahun 2025, 121 desa di Kabupaten Gowa menerima dana desa sebesar 121.278.081.000 dari pemerintah untuk membantu pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Suara GMBI: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan kebijakan dana desa diterapkan di desa-desa di Kabupaten Gowa yang memiliki karakteristik dataran rendah dan dataran tinggi, dan untuk menemukan penyebab utama dari perbedaan tingkat keberhasilan implementasi antara kedua jenis desa tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kebijakan kontekstual yang mempertimbangkan perbedaan geografis dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa.

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan. Rasio ketimpangan perdesaan turun dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin perdesaan turun dari 17,7 juta pada tahun 2014 menjadi 17,1 juta pada tahun 2017, dan persentase penduduk miskin perdesaan turun dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% pada tahun 2017. Implementasi program prioritas dan desa antara satu desa dengan desa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk sumber daya manusia, demografi, dan tingkat pendidikan. Perbedaan yang ditimbulkan oleh sumber daya manusia aparat desa dan tingkat pendidikan masyarakat telah banyak diteliti sebelumnya, tetapi perbedaan demografi seperti ketinggian belum pernah diteliti. Oleh karena itu, peneliti percaya bahwa penting untuk mengkaji perbedaan implementasi program prioritas dan desa antara satu desa dengan desa.

Salah satu desa di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah Bontoala, yang menerima dana desa setiap tahun. Di tahun 2017, Desa Bontoala menerima dana desa sebesar 2.013.167.345, tetapi pada tahun 2018, dana tersebut meningkat menjadi 2.393.292.723. Gowa adalah satu-satunya kabupaten yang selama tujuh tahun berturut-turut menerima hasil pemeriksaan BPK yang wajar. Jadi, sangat menarik untuk melihat bagaimana mekanisme evaluasi keuangan utama digunakan untuk membagi dana desa di Kabupaten Gowa, khususnya di Desa Bontoala.

Desa Parigi, yang berada jauh dari ibu kota Kecamatan Tinggimoncong, adalah salah satu desa yang masih tertinggal di dataran pengunungan Malino, terutama dalam hal pendidikan yang rendah. Masyarakat Desa Parigi hanya menerima pendidikan tingkat sekolah dasar karena mereka tidak memiliki sumber daya keuangan dan tidak menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Untuk memastikan bahwa tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat benar-benar terpenuhi, tentu banyak hal yang perlu diperbaiki dengan adanya Dana Desa.

Masyarakat sangat membutuhkan pembangunan desa. Ada kebutuhan untuk tata kelola yang baik mengingat banyaknya pembangunan yang tidak merata dan infrastruktur jalan. Jika tidak didukung dengan mekanisme perencanaan dan pelaksana yang baik dan sumber daya, kebijakan utamanya yang melibatkan dana besar tidak akan memberikan hasil yang optimal pada perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi (Inten dan Liliana, 2017). Misalnya, 900 kepala desa dari 74.000 desa yang menerima dana desa telah didakwa atas kasus korupsi pada tahun 2017. Meskipun ada kasus

korupsi, implementasi dana desa yang tepat sasaran dalam pembangunan desa hanya dapat terjadi jika mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi telah diterapkan dengan baik. Desa dengan medan berat sering tertinggal dalam pencapaian program karena perbedaan topografi; ini bukan karena niat, tetapi karena keterbatasan akses dan logistik (Rahayu et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini bukan hanya untuk mengumpulkan informasi dan data tentang penggunaan anggaran dana desa pada tahun 2018, tetapi juga untuk melihat bagaimana pengelolaan anggaran dana desa pada tahun 2018 berkontribusi pada pembangunan desa. karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul *"Manajemen Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Desa Dataran Rendah Dengan Dataran Tinggi Di Kabupaten Gowa"*.

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif karena mengkaji data deskriptif. Lokasi studi adalah Desa Bontoala di Kecamatan Pallangga dan Desa Parigi di Kecamatan Tinggimoncong di Kabupaten Gowa

b. Sumber dan Jenis Data

Observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan aparat desa adalah semua metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan sumber data untuk penelitian ini. Data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dengan orang-orang yang memahami masalah penelitian, merupakan sumber dari jenis data yang digunakan. Data sekunder diperoleh langsung dari Kantor Desa Bontoala di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan terdiri dari artikel dan dokumen terkait yang membantu orang memahami data penelitian

c. Instrument Penelitian

Penelitian ini menggunakan lembaran wawancara yang disusun berdasarkan indikator implemementasi yang berkaitan dengan elemen perencanaan. Lembaran wawancara ini telah divalidasi oleh ahli untuk keabsahannya

d. Tehnik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini termasuk (1) penelitian lapangan (field research), yang melibatkan wawancara langsung dengan informan peneliti, termasuk aparat desa, anggota BPD, anggota organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat; dan (2) penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengkajian literatur terkait dengan subjek yang diteliti. (3) Mencari di internet dan mengunjungi website dan situs web yang menawarkan informasi yang relevan dengan subjek penelitian. Menggunakan internet sebagai sumber acuan atau referensi untuk menemukan teori atau fakta yang relevan dengan subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Studi ini melibatkan desa Bontoala dan Parigi di Kabupaten Gowa. Desa Parigi berada di kecamatan Tinggimoncong dan desa Bontoala berada di kecamatan Pallangga, masing-masing mewakili wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Secara umum, bagaimana perbandingan tingkat pendidikan dan jenis mata pencaharian di kedua desa dibahas pada bagian ini. Karena ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa, selain perbedaan topologi, tingkat pendidikan dan jenis mata pencaharian sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Perbandingan persentase jenis mata pencaharian di desa Parigi dan Bontoala ditunjukkan pada tabel 1.

1. Proses Perencanaan Dana Desa

Baik di Desa Bontoala maupun di Desa Parigi, perencanaan dana desa diawali melalui proses musyawarah desa (Musdes). Forum ini merupakan wadah tertinggi pengambilan keputusan tingkat desa dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan desa. Di Desa Bontoala, proses Musdes dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi. Musyawarah menghasilkan dokumen RKPDDes yang kemudian menjadi dasar penyusunan APBDDes. Kepala desa dan perangkatnya menunjukkan pemahaman yang baik terhadap siklus perencanaan anggaran. Berdasarkan wawancara, kecepatan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan menjadi keunggulan desa ini, yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Kesiapan perangkat desa dalam menerima dan memahami kebijakan dana desa menjadi syarat penting agar implementasi berjalan efektif, terutama di desa0desa yang aksesibilitasnya terbatas (Akbar & Praabwati : 2018)

Di Desa Parigi, meskipun prosedur formal Musdes tetap dilaksanakan, partisipasi masyarakat cenderung lebih terbatas. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi kendala dalam optimalisasi perencanaan dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Namun demikian, pemerintah desa tetap berupaya melibatkan elemen masyarakat melalui forum musyawarah.

2. Dokumentasi dan Pelaporan

Perbedaan signifikan antara kedua desa tampak pada aspek pelaporan dan dokumentasi hasil perencanaan. Desa Bontoala memiliki sistem dokumentasi yang lebih tertib, dan pelaporan ke tingkat kabupaten dilakukan tepat waktu. Sebaliknya, Desa Parigi cenderung mengalami keterlambatan pelaporan karena keterbatasan perangkat desa dan sarana pendukung.

3. Keterlibatan Masyarakat

Sumber daya manusia tetap menjadi komponen utama dalam efektifitas pelaksanaan kebijakan, terutama dalam eksekusi langsung program yang ada di Desa, terutama dalam eksekusi langsung program berbasis dana desa (Dendi : 2023). Partisipasi masyarakat dalam forum Musdes di kedua desa masih bersifat pasif. Informan dari kelompok masyarakat seperti karang taruna, PKK, dan organisasi kepemudaan mengakui bahwa usulan masyarakat jarang menjadi bahan diskusi mendalam. Biasanya keputusan sudah disiapkan oleh pemerintah desa, dan masyarakat hanya memberikan persetujuan.

4. Perbandingan Anggaran

Berikut ringkasan anggaran dana desa tahun 2018 yang menunjukkan perbedaan proporsi alokasi anggaran:

Bidang Belanja	Desa Bontoala (Rp)	Desa Parigi (Rp)
Penyelenggaraan Pemerintahan	691.658.938	619.462.651
Pelaksanaan Pembangunan	1.325.217.342	998.931.765
Pembinaan Kemasyarakatan	158.831.560	118.200.104
Pemberdayaan Masyarakat	178.600.000	90.395.721
Jumlah Total	2.354.307.840	1.826.990.241

Tabel 1 Anggaran Dana Desa

Tabel di atas menunjukkan bahwa desa Bontoala memiliki anggaran yang lebih besar, terutama pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini memungkinkan desa untuk melaksanakan program lebih luas dan merata.

5. Pengaruh Faktor Geografis dan SDM

Kondisi geografis terbukti memengaruhi efektivitas implementasi dana desa. Desa Bontoala yang terletak di dataran rendah memiliki akses transportasi yang lebih baik dan kemudahan dalam koordinasi. Sementara itu, Desa Parigi menghadapi hambatan topografis dan kesenjangan infrastruktur, yang berdampak pada keterbatasan waktu, tenaga, serta biaya dalam pelaksanaan program. Di samping itu, kualitas SDM juga menjadi faktor penting. Desa dengan SDM lebih baik mampu mengelola perencanaan dan pelaporan dengan lebih efisien. Tingkat pendidikan dan pengalaman perangkat desa menjadi faktor pembeda utama antara kedua desa. Peneliti mencapai beberapa kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan dan diskusi penelitian. Saran-saran ini diharapkan dapat membantu dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan dana desa dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya:

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi perencanaan kebijakan dana desa di Desa Bontoala (dataran rendah) dan Desa Parigi (dataran tinggi) di Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses perencanaan kebijakan dana desa di kedua desa telah berjalan sesuai prosedur formal, yaitu melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya. Musyawarah ini menghasilkan dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes yang menjadi dasar penyusunan APBDes.
2. Kualitas sumber daya manusia dan letak geografis berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi. Desa Bontoala yang memiliki akses lebih baik dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif lebih tinggi menunjukkan proses pelaporan dan dokumentasi yang lebih tertib dan tepat waktu dibandingkan Desa Parigi.
3. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih bersifat pasif. Meskipun masyarakat diundang dalam forum musyawarah, kontribusi mereka terhadap pengambilan keputusan masih terbatas dan cenderung normatif.
4. Perbedaan topografi menghasilkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan dana desa, terutama terkait aksesibilitas, distribusi logistik, dan pemerataan pembangunan. Desa dataran tinggi menghadapi hambatan lebih besar yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

SARAN

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah:
 - a) Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa, khususnya di daerah dataran tinggi, melalui pelatihan teknis dan manajerial dalam perencanaan, pelaporan, serta pengelolaan keuangan desa.
 - b) Perkuat mekanisme pengawasan dan pendampingan terhadap pengelolaan dana desa untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program.

- c) Alokasi dana desa sebaiknya mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosial desa sebagai variabel penting dalam kebijakan distribusi dan perencanaan program.
2. Bagi Pemerintah Desa:
 - a) Diperlukan upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dengan memberikan ruang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi dan usulan program prioritas.
 - b) Lakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan Musdes agar tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar menjadi sarana demokratis dan representatif.
 3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a) Disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dengan melibatkan lebih banyak desa dari berbagai topografi agar hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan secara lebih luas.
 - b) Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada aspek implementasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terhadap siklus kebijakan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., & Prabawati, I. (2018). *Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*. Publika.<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/24829>
- Dendi, R. (2023). *Implementasi Program Padat Karya Tunai di Desa Teratak Rendah Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Islam Kuantan Singingi. <http://repository.uniks.ac.id/id/eprint/560>
- Inten, M., & Liliana. (2017). *Pengelolaan keuangan dana desa*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(2), 234–248.
- Kapita, M., Mingkid, E., & Rares, J. J. (2021). Implementasi kebijakan dana desa di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 10(1), 55–64.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku pintar dana desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Putra, C. K. (2013). *Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik, 1(6), 1203–1212.
- Rahayu, S., Trianfano, A., & Pazqara, E. W. (2024). *Implementasi Dana Desa sebagai Upaya Pengembangan Indeks Desa Membangun di Desa Kasegeran Kecamatan Cilogok*. Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA). <https://journal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/398>
- Satria, C., Thoyib, M., Septiana, & Amri, D. (2020). Analisis kinerja pengelolaan keuangan desa (Studi pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). *Jurnal Ekonomika Syariah*, 5(2), 45–59.
- Suara GMBI. (2025). *Realisasi dana desa Kabupaten Gowa*. Diakses dari <https://suaragmbi.id/realisasi-dana-desa-gowa-2025>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.